

## **DIPLOMASI INDONESIA DENGAN MYANMAR DALAM RANGKA PENYELAMATAN WNI BERMASALAH**

**Dody Adhi Nugroho<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### **ABSTRACT**

*This study analyzes Indonesia's diplomacy with Myanmar in the effort to rescue Indonesian citizens (WNI) in distress amid the complex political and security situation following the 2021 military coup. The increasing cases of human trafficking, online scams, and illegal labor exploitation involving Indonesian citizens in Myanmar have compelled the state to optimize diplomacy as an instrument of citizen protection. This research employs a qualitative descriptive approach, utilizing literature study and internet-based data collection techniques. The analytical framework includes neorealism, human security, and the concept of diplomacy to explain the role of state and non-state actors, as well as the dynamics of the international structure in the rescue process.*

*The findings indicate that Indonesia's diplomacy is not only conducted through formal channels (track one diplomacy), but also involves a multi-track diplomacy approach engaging international organizations, civil society, and regional cooperation. However, the implementation faces several challenges, including limited diplomatic access, unstable security conditions, and ASEAN's non-intervention principle. This study concludes that the effectiveness of Indonesia's diplomacy in ensuring the human security of its citizens depends on synergy among actors and adaptive diplomatic strategies in responding to regional dynamics.*

*Keywords: Indonesian diplomacy, Myanmar, distressed citizens, human security, multi-track diplomacy, citizen protection*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini menganalisis diplomasi Indonesia dengan Myanmar dalam rangka penyelamatan Warga Negara Indonesia (WNI) bermasalah di tengah kompleksitas situasi politik dan keamanan pasca kudeta militer 2021. Meningkatnya kasus perdagangan orang, penipuan daring, serta eksploitasi tenaga kerja ilegal yang melibatkan WNI di Myanmar mendorong negara untuk mengoptimalkan peran diplomasi sebagai instrumen perlindungan warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelusuran berbasis internet. Kerangka analitik yang digunakan meliputi neorealisme, human security, dan konsep diplomasi, guna menjelaskan peran negara, aktor non-negara, serta dinamika struktur internasional dalam proses penyelamatan WNI.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya dilakukan melalui jalur formal (track one diplomacy), tetapi juga melibatkan pendekatan multi-track diplomacy dengan melibatkan organisasi internasional, masyarakat sipil, serta kerja sama regional. Meskipun demikian, pelaksanaan diplomasi menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses diplomatik, situasi keamanan yang tidak kondusif, serta prinsip non-intervensi ASEAN. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas diplomasi Indonesia dalam menjamin human security WNI sangat bergantung pada sinergi antar aktor serta adaptasi strategi diplomasi dalam menghadapi dinamika kawasan.*

*Kata Kunci: diplomasi Indonesia, Myanmar, WNI bermasalah, human security, multi-track diplomacy, perlindungan warga negara*

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya intensitas mobilitas manusia lintas negara telah membawa implikasi yang signifikan terhadap dinamika hubungan internasional, khususnya dalam aspek perlindungan warga negara di luar negeri. Arus perpindahan manusia yang semakin masif, baik untuk kepentingan ekonomi, pendidikan, maupun sosial, menjadikan isu perlindungan warga negara sebagai salah satu agenda penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah migran internasional yang besar menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjamin keamanan, keselamatan, serta pemenuhan hak-hak dasar Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia (PMI), wisatawan, maupun individu yang menetap di luar negeri secara langsung meningkatkan potensi munculnya berbagai permasalahan, mulai dari persoalan administratif hingga kasus-kasus serius yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan kemanusiaan.

Dalam konteks tersebut, data yang menunjukkan tingginya jumlah penempatan PMI serta besarnya kontribusi remitansi memperlihatkan bahwa migrasi internasional memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Namun demikian, di balik kontribusi tersebut, terdapat risiko besar yang dihadapi oleh para WNI, khususnya mereka yang bekerja melalui jalur non-prosedural. Kerentanan ini semakin meningkat ketika WNI berada di negara-negara dengan kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil, serta lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing.

Salah satu negara yang menjadi perhatian khusus dalam isu perlindungan WNI adalah Myanmar. Sejak terjadinya kudeta militer pada tahun 2021, Myanmar mengalami instabilitas politik yang signifikan yang ditandai dengan konflik bersenjata, melemahnya institusi negara, serta menurunnya kapasitas penegakan hukum. Kondisi tersebut menciptakan ruang bagi berkembangnya berbagai aktivitas ilegal, seperti perdagangan orang, penipuan daring (*online scam*), kerja paksa, serta berbagai bentuk eksploitasi lainnya. Situasi ini berdampak langsung terhadap keberadaan WNI di Myanmar, terutama mereka yang masuk melalui jalur ilegal atau direkrut melalui mekanisme yang tidak transparan.

Fenomena maraknya kasus WNI yang terjebak dalam sindikat penipuan daring dan perdagangan orang menunjukkan adanya pola kejahatan transnasional yang terorganisir. Banyak WNI yang awalnya tergiur oleh tawaran pekerjaan dengan imbalan tinggi melalui media sosial, namun pada kenyataannya justru menjadi korban eksploitasi di wilayah konflik seperti Myawaddy. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap pekerja migran, tetapi juga menunjukkan kompleksitas permasalahan yang melibatkan aktor lintas negara, jaringan kriminal internasional, serta keterbatasan kapasitas negara dalam melakukan intervensi langsung.

Dalam perspektif hubungan internasional, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ancaman terhadap *human security*, di mana individu sebagai subjek utama keamanan menghadapi berbagai risiko yang mengancam keselamatan fisik, kesejahteraan ekonomi, serta kebebasan dasar. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya, termasuk mereka yang berada di luar wilayah kedaulatan. Perlindungan WNI di luar negeri

menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia yang diimplementasikan melalui berbagai instrumen diplomasi.

Namun, implementasi diplomasi dalam upaya penyelamatan WNI bermasalah di Myanmar menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Keterbatasan akses diplomatik akibat situasi politik domestik Myanmar, hubungan yang tidak sepenuhnya stabil dengan rezim militer, serta kondisi keamanan yang tidak kondusif menjadi hambatan utama dalam proses evakuasi dan repatriasi. Selain itu, prinsip non-intervensi yang menjadi landasan kerja sama regional di Asia Tenggara turut membatasi ruang gerak negara dalam melakukan tindakan yang lebih langsung terhadap permasalahan internal negara lain.

Dalam menghadapi keterbatasan tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan diplomasi formal (*track one diplomacy*), tetapi juga mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel melalui *multi-track diplomacy*. Pendekatan ini melibatkan berbagai aktor di luar negara, seperti organisasi internasional, lembaga non-pemerintah, serta masyarakat sipil, guna memperluas jangkauan dan efektivitas upaya penyelamatan WNI. Sinergi antaraktor menjadi elemen penting dalam mengatasi kompleksitas permasalahan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui jalur diplomasi konvensional.

Dengan demikian, diplomasi Indonesia dengan Myanmar dalam rangka penyelamatan WNI bermasalah merupakan isu yang memiliki relevansi akademis dan praktis yang tinggi. Analisis terhadap bentuk dan strategi diplomasi yang dilakukan, peran aktor yang terlibat, serta kendala yang dihadapi akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana negara menjalankan fungsi perlindungan terhadap warganya di tengah dinamika sistem internasional yang kompleks. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hubungan internasional, khususnya dalam bidang diplomasi perlindungan warga negara (*citizen protection diplomacy*) dan praktik diplomasi di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis diplomasi Indonesia dengan Myanmar dalam rangka penyelamatan WNI bermasalah, dengan menelaah bentuk dan strategi diplomasi yang dilakukan, peran aktor yang terlibat, kendala dan tantangan yang dihadapi, serta tingkat efektivitasnya dalam menjamin perlindungan dan keamanan WNI di luar negeri.

## **KERANGKA ANALITIK**

Dalam penelitian ini, kerangka analitik digunakan sebagai landasan konseptual untuk memahami dan menjelaskan fenomena diplomasi Indonesia dengan Myanmar dalam rangka penyelamatan Warga Negara Indonesia (WNI) bermasalah. Kerangka ini disusun untuk memberikan arah analisis yang sistematis dengan mengintegrasikan teori dan konsep yang relevan, sehingga mampu menjelaskan dinamika interaksi antaraktor, kepentingan negara, serta keterbatasan struktural dalam sistem internasional.

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah neorealisme (realisme struktural) yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz. Menurut Waltz, sistem internasional bersifat anarkis, yaitu tidak adanya otoritas tertinggi yang dapat mengatur perilaku negara. Dalam kondisi tersebut, negara sebagai aktor utama dituntut untuk mengandalkan kemampuan sendiri (*self-help*) guna menjamin kelangsungan hidupnya. Ketidakpastian

terhadap niat negara lain mendorong negara untuk bertindak rasional dalam memaksimalkan kepentingannya, khususnya dalam aspek keamanan. Lebih lanjut, pemikiran neorealisme juga dikembangkan oleh John Mearsheimer yang menekankan bahwa negara cenderung meningkatkan kekuatan untuk mengantisipasi ancaman dalam sistem internasional yang kompetitif. Dalam konteks penelitian ini, neorealisme digunakan untuk menjelaskan bagaimana Indonesia merumuskan kebijakan luar negeri dalam situasi yang dibatasi oleh struktur internasional, termasuk keterbatasan intervensi terhadap Myanmar akibat prinsip non-intervensi kawasan serta kondisi politik domestik Myanmar yang tidak stabil.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep *human security* untuk memahami dimensi keamanan yang berpusat pada individu. Konsep ini menekankan bahwa keamanan tidak hanya terbatas pada negara, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap individu dari berbagai ancaman yang mengganggu keselamatan dan kesejahteraan hidupnya. Dalam tesis ini, *human security* dijelaskan melalui pendekatan yang dikembangkan oleh berbagai studi, termasuk pandangan yang menekankan pentingnya keamanan fisik, kebebasan dasar, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi individu. Dengan demikian, WNI yang berada dalam kondisi rentan di Myanmar, seperti korban perdagangan orang, kerja paksa, dan penipuan daring, dapat dipahami sebagai subjek yang menghadapi ancaman serius terhadap keamanan manusia. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia tidak hanya dilihat sebagai instrumen politik luar negeri, tetapi juga sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Selanjutnya, konsep diplomasi digunakan untuk menjelaskan mekanisme yang ditempuh negara dalam mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Mengacu pada pemikiran William D. Coplin, kebijakan luar negeri merupakan respons negara terhadap tindakan negara lain dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Sementara itu, Hans J. Morgenthau menegaskan bahwa kepentingan nasional merupakan dasar utama dalam perumusan kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini, diplomasi menjadi instrumen utama untuk mewujudkan kepentingan tersebut, termasuk dalam upaya melindungi warga negara di luar negeri. Selain itu, klasifikasi kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Donald E. Nuechterlein, yang mencakup aspek pertahanan, ekonomi, tata dunia, dan ideologi yang memberikan kerangka tambahan untuk memahami bagaimana perlindungan WNI menjadi bagian dari kepentingan strategis negara.

Dalam praktiknya, diplomasi dalam penelitian ini tidak hanya dipahami dalam bentuk formal (*track one diplomacy*), tetapi juga melalui pendekatan yang lebih luas yaitu *multi-track diplomacy*. Pendekatan ini melibatkan berbagai aktor di luar negara, termasuk organisasi internasional, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil, yang berperan dalam mendukung upaya penyelamatan WNI. Keterlibatan berbagai aktor ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah internasional yang kompleks memerlukan kolaborasi lintas sektor yang tidak terbatas pada hubungan antarnegara semata.

Dengan mengintegrasikan neorealisme, *human security*, dan konsep diplomasi, penelitian ini membangun kerangka analisis yang komprehensif. Neorealisme memberikan pemahaman mengenai batasan struktural dalam sistem internasional, *human security* menekankan urgensi perlindungan individu sebagai tujuan utama, sementara konsep diplomasi menjelaskan instrumen dan strategi yang digunakan oleh negara. Ketiga

pendekatan ini saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana Indonesia menjalankan diplomasi dalam upaya penyelamatan WNI bermasalah di Myanmar.

Melalui kerangka analitik ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis bentuk dan strategi diplomasi yang dilakukan Indonesia, peran aktor-aktor yang terlibat, kendala dan tantangan yang dihadapi, serta tingkat efektivitas diplomasi dalam menjamin perlindungan dan keamanan WNI. Dengan demikian, kerangka analitik ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar teoritis, tetapi juga sebagai panduan dalam melakukan analisis yang sistematis dan mendalam terhadap fenomena yang dikaji.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena diplomasi Indonesia dalam upaya penyelamatan Warga Negara Indonesia (WNI) bermasalah di Myanmar, yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif, melainkan melalui interpretasi terhadap data dan konteks yang melatarbelakanginya. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan realitas empiris sekaligus menganalisis hubungan antara konsep teoritik dengan praktik kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengandalkan berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga terkait, berita, serta literatur akademik yang telah digunakan dalam tesis. Data yang dikumpulkan difokuskan pada informasi mengenai kondisi WNI di Myanmar, bentuk diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, serta dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan Myanmar dalam konteks perlindungan warga negara.

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi dan pemilahan terhadap data yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan informasi secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Sementara itu, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan kerangka analitik yang telah disusun sebelumnya, yaitu dengan mengintegrasikan perspektif neorealisme, konsep human security, serta diplomasi. Kerangka ini digunakan sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana Indonesia merumuskan dan melaksanakan strategi diplomasi dalam menghadapi keterbatasan struktural sistem internasional, sekaligus menjawab kebutuhan perlindungan terhadap WNI sebagai bagian dari kepentingan nasional.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan analitis mengenai praktik diplomasi Indonesia dalam penyelamatan WNI di Myanmar, serta menjelaskan keterkaitan antara teori dan praktik dalam konteks hubungan internasional.

## PEMBAHASAN

Bagian pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fenomena diplomasi Indonesia dalam upaya penyelamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermasalah di Myanmar. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris yang terdapat dalam penelitian dengan kerangka analitik yang telah disusun sebelumnya, yaitu melalui perspektif neorealisme, konsep *human security*, serta diplomasi sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Permasalahan yang dihadapi WNI di Myanmar tidak hanya mencerminkan dinamika hubungan bilateral antara kedua negara, tetapi juga menunjukkan kompleksitas isu transnasional yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Oleh karena itu, pembahasan ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa aspek utama, yang meliputi kondisi dan permasalahan WNI, bentuk dan strategi diplomasi Indonesia, peran aktor yang terlibat, kendala yang dihadapi, serta analisis terhadap efektivitas diplomasi yang dilakukan. Melalui penguraian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana Indonesia merespons tantangan dalam melindungi warganya di tengah keterbatasan sistem internasional dan situasi domestik Myanmar yang kompleks.

### 1. Kondisi dan Permasalahan WNI di Myanmar

Permasalahan Warga Negara Indonesia (WNI) di Myanmar dalam penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya intensitas kejahatan transnasional yang berkembang seiring dengan dinamika globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Berdasarkan temuan dalam tesis, bentuk kejahatan yang paling dominan adalah perdagangan orang (*human trafficking*) dan penipuan berbasis daring (*online scam*), yang secara sistematis menargetkan individu-individu dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Modus operandi yang digunakan umumnya melalui perekrutan tenaga kerja dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, namun pada kenyataannya para korban justru ditempatkan dalam kondisi eksploitatif yang jauh dari standar kerja yang layak.

Lebih lanjut, dalam praktiknya, para WNI yang menjadi korban tidak hanya mengalami penipuan pada tahap awal perekrutan, tetapi juga menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Mereka seringkali dipaksa untuk bekerja dalam tekanan, mengalami pembatasan kebebasan bergerak, serta berada di bawah pengawasan ketat yang menghalangi mereka untuk melarikan diri atau menghubungi pihak luar. Dalam beberapa kasus yang diuraikan dalam tesis, korban juga dihadapkan pada ancaman kekerasan fisik maupun psikologis apabila tidak memenuhi target kerja yang ditentukan oleh pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dialami WNI telah melampaui aspek ekonomi semata, dan telah masuk ke dalam ranah eksploitasi manusia yang serius.

Kondisi tersebut semakin diperparah oleh situasi politik dan keamanan domestik Myanmar yang tidak stabil. Konflik internal yang terjadi telah menyebabkan melemahnya kapasitas negara dalam menjalankan fungsi kontrol dan penegakan hukum secara efektif di seluruh wilayahnya. Akibatnya, muncul ruang-ruang yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah, yang kemudian dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional untuk menjalankan aktivitas ilegal mereka. Dalam konteks ini, keberadaan WNI di wilayah-

wilayah tersebut menempatkan mereka dalam posisi yang sangat rentan, karena minimnya perlindungan hukum serta terbatasnya akses terhadap bantuan resmi.

Dari perspektif keamanan manusia (*human security*), kondisi yang dialami WNI di Myanmar mencerminkan adanya ancaman multidimensional yang mencakup aspek keamanan fisik, ekonomi, dan sosial. Ancaman terhadap keselamatan jiwa, kebebasan individu, serta kesejahteraan hidup menjadi indikator bahwa para korban tidak hanya menghadapi risiko jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis dan sosial mereka. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak dapat dipahami hanya sebagai isu migrasi tenaga kerja atau pelanggaran keimigrasian, melainkan sebagai krisis perlindungan individu yang memerlukan respons komprehensif dari negara.

Di sisi lain, tesis juga menunjukkan bahwa faktor domestik di Indonesia turut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah WNI yang menjadi korban. Keterbatasan akses terhadap informasi yang akurat mengenai peluang kerja di luar negeri, serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat tertentu, menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, dorongan ekonomi dan keinginan untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi seringkali membuat individu mengabaikan aspek legalitas dan keamanan dalam proses migrasi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan WNI di Myanmar tidak sepenuhnya bersumber dari faktor eksternal, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi di dalam negeri.

Dengan demikian, kondisi dan permasalahan WNI di Myanmar dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang melibatkan interaksi antara faktor eksternal dan internal. Kompleksitas ini menuntut adanya pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penanganan kasus secara reaktif, tetapi juga mencakup upaya preventif dan peningkatan kapasitas perlindungan warga negara secara menyeluruh.

## **2. Bentuk dan Strategi Diplomasi Indonesia**

Dalam merespons kompleksitas permasalahan WNI di Myanmar, pemerintah Indonesia mengedepankan diplomasi sebagai instrumen utama dalam kebijakan luar negeri untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Berdasarkan temuan dalam tesis, diplomasi yang dilakukan tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup berbagai bentuk dan strategi yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan, khususnya dengan mempertimbangkan keterbatasan struktural dan situasional yang dihadapi.

Secara umum, diplomasi Indonesia dilakukan melalui pendekatan bilateral dengan pemerintah Myanmar. Dalam hal ini, Indonesia berupaya menjalin komunikasi dan koordinasi dengan otoritas setempat guna memperoleh akses terhadap WNI yang berada dalam kondisi bermasalah. Upaya ini mencakup proses identifikasi, pendataan, serta fasilitasi pemulangan WNI ke Indonesia. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan dalam tesis, efektivitas diplomasi bilateral ini seringkali menghadapi kendala yang signifikan, terutama karena tidak semua wilayah di Myanmar berada di bawah kontrol penuh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam implementasi kebijakan yang telah disepakati secara formal.

Selain pendekatan bilateral, Indonesia juga mengembangkan strategi diplomasi yang lebih fleksibel melalui pendekatan *multi-track diplomacy*. Pendekatan ini melibatkan

berbagai aktor di luar negara, seperti organisasi internasional, lembaga non-pemerintah, serta jaringan masyarakat sipil yang memiliki akses langsung ke lokasi-lokasi di mana WNI berada. Dalam konteks ini, diplomasi tidak hanya dilakukan melalui jalur resmi antarnegara, tetapi juga melalui kerja sama informal yang memungkinkan adanya pertukaran informasi, akses lapangan, serta dukungan operasional dalam proses penyelamatan WNI.

Lebih lanjut, strategi diplomasi Indonesia juga menunjukkan adanya adaptasi terhadap karakteristik permasalahan yang dihadapi. Mengingat kasus yang melibatkan WNI di Myanmar berkaitan dengan jaringan kejahatan transnasional, maka pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada hubungan antarnegara, tetapi juga mencakup upaya untuk menjangkau aktor-aktor non-negara yang terlibat dalam praktik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia tidak bersifat statis, melainkan berkembang sesuai dengan dinamika permasalahan yang dihadapi.

Dalam perspektif kebijakan luar negeri, langkah-langkah yang diambil Indonesia mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan keterbatasan yang ada dalam sistem internasional. Di satu sisi, perlindungan WNI merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang tidak dapat diabaikan. Namun di sisi lain, Indonesia juga harus menghormati kedaulatan negara lain serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam hubungan internasional, seperti non-intervensi. Oleh karena itu, diplomasi yang dilakukan cenderung bersifat persuasif dan kooperatif, dengan mengedepankan dialog serta kerja sama dibandingkan pendekatan konfrontatif.

Selain itu, dalam tesis juga terlihat bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus secara jangka pendek, tetapi juga mencakup upaya untuk membangun mekanisme kerja sama yang lebih berkelanjutan. Hal ini tercermin dari upaya koordinasi yang dilakukan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas perlindungan WNI di luar negeri. Dengan demikian, diplomasi tidak hanya dipahami sebagai respons terhadap krisis, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam pengelolaan isu perlindungan warga negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk dan strategi diplomasi Indonesia dalam penelitian ini bersifat multidimensional, yang mengombinasikan pendekatan bilateral, multi-aktor, serta adaptasi terhadap kondisi lapangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi permasalahan yang kompleks dan lintas batas, negara tidak dapat bergantung pada satu strategi saja, melainkan perlu mengintegrasikan berbagai instrumen diplomasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### **3. Peran Aktor dalam Proses Penyelamatan WNI**

Proses penyelamatan WNI di Myanmar melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Negara tetap menjadi aktor utama, khususnya melalui kementerian terkait dan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri. Peran ini mencakup koordinasi, negosiasi, serta fasilitasi proses evakuasi dan pemulangan WNI.

Namun demikian, keterlibatan aktor non-negara juga menjadi elemen penting dalam keseluruhan proses. Organisasi internasional, lembaga non-pemerintah, serta jaringan masyarakat sipil turut berkontribusi dalam memberikan informasi, akses, dan bantuan

operasional di lapangan. Keterlibatan aktor-aktor ini menunjukkan bahwa penyelesaian isu lintas negara memerlukan pendekatan kolaboratif yang melampaui batas-batas negara.

Dalam konteks ini, interaksi antaraktor mencerminkan praktik *multi-track diplomacy*, di mana berbagai jalur komunikasi dan kerja sama dimanfaatkan secara simultan. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam menghadapi permasalahan kompleks seperti perdagangan orang, negara tidak dapat bertindak secara unilateral, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

#### **4. Kendala dan Tantangan dalam Diplomasi Indonesia**

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, diplomasi Indonesia dalam penyelamatan WNI di Myanmar menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah prinsip non-intervensi yang dianut dalam hubungan antarnegara, khususnya dalam konteks kawasan Asia Tenggara. Prinsip ini membatasi ruang gerak Indonesia untuk melakukan intervensi langsung terhadap kondisi internal Myanmar.

Selain itu, situasi politik dan keamanan di Myanmar yang tidak stabil juga menjadi hambatan serius. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya akses terhadap wilayah-wilayah tertentu, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan evakuasi WNI. Keterlibatan aktor non-negara dalam praktik kejahatan transnasional juga menambah kompleksitas permasalahan, karena tidak semua pihak berada dalam kontrol pemerintah.

Kendala lainnya adalah keterbatasan informasi yang akurat mengenai keberadaan WNI, serta kesulitan dalam melakukan koordinasi lintas aktor. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas internal dalam pengelolaan data dan koordinasi kebijakan.

#### **5. Analisis Efektivitas Diplomasi Indonesia**

Efektivitas diplomasi Indonesia dalam penelitian ini dapat dilihat dari sejauh mana upaya yang dilakukan mampu mencapai tujuan utama, yaitu penyelamatan dan perlindungan WNI di Myanmar. Berdasarkan analisis dalam tesis, diplomasi Indonesia menunjukkan hasil yang relatif positif dalam beberapa kasus, khususnya dalam hal pemulangan WNI ke tanah air. Namun demikian, efektivitas tersebut masih bersifat terbatas dan belum mampu mengatasi akar permasalahan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan struktural dalam sistem internasional, kondisi domestik Myanmar, serta kompleksitas jaringan kejahatan transnasional.

Dalam perspektif neorealisme, keterbatasan ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari struktur sistem internasional yang anarkis, di mana negara memiliki batasan dalam memengaruhi negara lain. Sementara itu, dari sudut pandang human security, upaya yang dilakukan Indonesia menunjukkan komitmen terhadap perlindungan individu, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Dengan demikian, diplomasi Indonesia dapat dikatakan efektif dalam jangka pendek, khususnya dalam penyelamatan individu, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek pencegahan dan kerja sama jangka panjang untuk mengatasi permasalahan secara lebih komprehensif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan Warga Negara Indonesia (WNI) di Myanmar merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Keberadaan WNI dalam situasi bermasalah tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya kejahatan transnasional seperti perdagangan orang dan penipuan daring, tetapi juga diperparah oleh kondisi politik dan keamanan Myanmar yang tidak stabil, serta faktor domestik di Indonesia seperti keterbatasan informasi dan dorongan ekonomi. Kondisi ini menempatkan WNI dalam posisi rentan yang mencerminkan ancaman serius terhadap keamanan manusia (*human security*), sehingga membutuhkan respons yang komprehensif dari negara. Dalam merespons permasalahan tersebut, Indonesia mengedepankan diplomasi sebagai instrumen utama kebijakan luar negeri dengan menggabungkan berbagai pendekatan, baik melalui jalur bilateral maupun *multi-track diplomacy*. Pendekatan ini menunjukkan adanya adaptasi strategi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi keterbatasan struktural sistem internasional, khususnya terkait prinsip non-intervensi dan keterbatasan kontrol pemerintah Myanmar terhadap wilayahnya. Keterlibatan berbagai aktor, baik negara maupun non-negara, menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas proses penyelamatan WNI.

Namun demikian, diplomasi Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan, seperti kompleksitas jaringan kejahatan transnasional, keterbatasan akses terhadap wilayah tertentu, serta tantangan koordinasi lintas aktor. Hal ini menyebabkan efektivitas diplomasi cenderung bersifat parsial, terutama dalam menyelesaikan kasus secara jangka pendek, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan secara menyeluruh. Dalam perspektif neorealisme, kondisi ini mencerminkan adanya batasan struktural dalam sistem internasional yang membatasi kemampuan negara dalam memengaruhi aktor lain, sementara dari sudut pandang *human security*, upaya yang dilakukan menunjukkan komitmen negara dalam melindungi individu, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa diplomasi Indonesia dalam penyelamatan WNI di Myanmar telah menunjukkan peran yang signifikan, namun masih memerlukan penguatan, baik dalam aspek koordinasi, strategi pencegahan, maupun kerja sama jangka panjang. Upaya perlindungan warga negara tidak hanya membutuhkan respons reaktif terhadap kasus yang terjadi, tetapi juga strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengantisipasi serta meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- AlFiqri. (2025). Kamboja dan Myanmar bukan negara penempatan PMI, kalau ada itu ilegal. *Sindo.com*. Retrieved November 10, 2025, from <https://nasional.sindonews.com/read/1637775/15/kamboja-dan-myanmar-bukan-negara-penempatan-pmi-mukhtarudin-kalau-ada-berangkat-itu-ilegal-1761649824>

- Alifiyah, M. (2025). Diplomasi perlindungan Indonesia dalam penanganan pekerja migran Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar tahun 2024–2025. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Appleby, R. (2000). *The ambivalence of the sacred: Religion, violence, and reconciliation*. Rowman & Littlefield.
- Asrudin, A. (2017). Thomas Kuhn dan teori hubungan internasional: Realisme sebagai paradigma. *Indonesian Journal of International Studies*, 114–115.
- Barnett, M. (2011). *Empire of humanity: A history of humanitarianism*. Cornell University Press.
- Barnett, M., & Stein, J. (2012). Religion and humanitarianism. *International Studies Review*, 14(3), 359–379.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Cipta.
- Bebbington, A., Hickey, S., & Mitlin, D. (2008). *Can NGOs make a difference? The challenge of development alternatives*. Zed Books.
- Clarke, G. (2013). Faith-based organizations and international development. *Third World Quarterly*, 34(4), 685–703.
- Cottle, S. (2009). *Global crisis reporting: Journalism in the global age*. McGraw-Hill.
- Dharmaputra, R. (2018). Neorealisme dalam teori hubungan internasional (perspektif klasik). Dalam V. Dugis (Ed.), *Teori hubungan internasional*. Airlangga University Press.
- Diamond, L., & McDonald, J. W. (1996). *Multi-track diplomacy: A systems approach to peace*. Kumarian Press.
- Dugis, V. (Ed.). (2018). *Teori hubungan internasional (perspektif-perspektif klasik)*. Airlangga University Press.
- Fadhilurrahman. (2025). Daftar negara dengan penduduk terbanyak di dunia Juni 2025. *Katadata.co.id*. Retrieved October 30, 2025, from <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/004e226d2094322/daftar-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-juni-2025>
- Glanville, J. L., & Story, W. T. (2018). Social capital and self-rated health: Clarifying the role of trust. *Social Science Research*, 71, 98–108. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2018.01.002>
- Glen, M. (2020). Kepentingan nasional dan diplomasi ala Indonesia dalam penyelesaian konflik etnis Rohingya di Myanmar. *Jurnal Hubungan Internasional*, XIII.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok metode penelitian*. PT Bumi Aksara.
- Haynes, J. (2007). *An introduction to international relations and religion*. Pearson Education.
- Hoover, S. M. (2012). Religion and media. *Communication Research Trends*, 31(2), 3–27.
- Irfani. (2025). Pengakuan WNI yang menyelamatkan diri dari perusahaan Kamboja Myanmar. *BBC.com*. Retrieved November 10, 2025, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gzd4y9rvno>
- Isa. (2025). Kemlu pulangkan 84 WNI dari pusat online scam ilegal di Myanmar. *CNN Indonesia*. Retrieved November 5, 2025, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250228101018-106-1203397/kemlu-ri-pulangkan-84-wni-dari-pusat-online-scam-ilegal-di-myanmar>

- Jose, B. A. (2015). Achieving human security for migrants: The limits of state policies and migration-development initiatives. *Journal of the Global South*, 2(21), 1–13.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics*. Cornell University Press.
- Khofifah, A., Shelbina, S., & Averina, N. (2025). ASEAN dan diplomasi regional: Peran Indonesia dalam mediasi konflik Myanmar. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10, 1314.
- Louise, D., & McDonald, J. (1996). *Multi-track diplomacy: A systems approach to peace* (3rd ed.). Kumarian Press.
- Matthew, G. (2020). Kepentingan nasional Indonesia dan diplomasi ala Indonesia dalam penyelesaian konflik Rohingya. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(1), 75.
- Naing, C. (2021). Myanmar junta's top diplomat in talks with Thailand Indonesia. *Southeast Asia Globe*. Retrieved November 8, 2025, from <https://southeastasiaglobe.com/myanmar-junta-meets-with-foreign-governments/>
- Nazir, M. (2003). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pertiwi, V., & Daspar. (2025). Kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dalam perspektif ekonomi. *Journal of Business Economics and Management*, 1–4.
- Sabrina, F., & Prasetyo, H. (2024). Upaya hukum dan pemulangan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. *Jurnal Media Hukum Indonesia*, 2.
- Safitri, D., & Wibisono, A. (2023). Keamanan manusia pekerja migran Indonesia. *Intermestic Journal of International Studies*, 741–769.
- Sandrina, & Isabel. (2018). Introducing realism in international relations theory. *International Relations*.
- Santoso, R., Moenardy, D., & Muttaqin, R. (2024). Digital diplomacy of Indonesia in realizing its vision as the ASEAN digital economy hub. *Journal of International Relations*.
- Saleh, S. (2023). *Analisis data kualitatif*. Penerbit Pustaka.
- Sirajuddin, S. (2023). *Analisis data kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, & Saksitha, D. (2024). Teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah.
- Suryokusumo, S. (2004). *Praktik diplomasi*. STIH IBLAM.
- Satudata. (2025). Data tenaga kerja TW II tahun 2025. *Kemnaker.go.id*. Retrieved November 1, 2025, from <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data>
- UNOCHA. (2009). *OCHA annual report 2009*. Retrieved May 1, from <https://www.unocha.org/publications/report/world/ocha-annual-report-2009>
- Waltz, K. N. (1959). *Journal of International Affairs* 21. University Press.
- Wardah. (2025). Kemlu RI: 525 WNI terlibat kasus online scam di Myawaddy. *VOA Indonesia*. Retrieved November 12, 2025, from <https://www.voaindonesia.com/a/kemlu-ri-525-wni-terlibat-kasus-online-scam-di-myawaddy/8001524.html>
- Wijayanti, A. (2022). Pengaruh kepentingan nasional dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. *International Economics Politics*, 70–95.